

**PERAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) DALAM  
MENJAMIN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENERBANGAN DAN  
HUBUNGANNYA DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**INTISARI**

Oleh : Grace Ulin Bella Kaban

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam menjamin perlindungan konsumen penerbangan dan hubungannya dengan Kementerian Perhubungan didasarkan pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam menjamin perlindungan konsumen penerbangan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari kenyataan dan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber di lapangan yang terkait dengan perlindungan konsumen penerbangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berperan hanya sebagai badan pemberi saran dan pertimbangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk sepenuhnya menjamin perlindungan konsumen penerbangan. Selanjutnya hasil rekomendasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memberikan pengaruh yang tidak signifikan kepada perlindungan konsumen penerbangan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Kementerian Perhubungan

**THE ROLE OF NATIONAL CONSUMER PROTECTION BOARD IN  
GUARANTEE THE CONSUMER PROTECTION OF FLIGHT AND IN  
RELATED TO THE MINISTRY OF TRANSPORTATION BASED ON THE  
LAW ACT NO.8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION**

**ABSTRACT**

By : Grace Ulin Bella Kaban

This study aims to discuss about the role of National Consumer Protection Board guarantee the consumer protection of flight in related to the Ministry of Transportation based on the Law Act No.8 of 1999 of Consumer Protection and the obstacles of Nasional Consumer Protection Board in guarantee the consumer protection of flight.

This study constitutes the study of juridical empiric which is based on the reality and common problems happen in society in line with the applicable Law Regulations and the various field sources in related to the consumer protection of flight. This study was conducted by library study to obtain the secondary data and field study to obtain the primary data.

Based on the result of field study at the National Consumer Protection Board which only play a role as a suggest and consider board with totally no legal force to guaranttee the consumer protection of flight. Furthermore, the result of recommendation from National Consumer Protection Board will give the insignificant impact towards the consumer protection of flight.

Key words : Consumer Protection, National Consumer Protection Board, Ministry of Transportation